

RINGKASAN

DINDA SABRINA NAINGGOLAN
190510038

Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M. Hum. dan Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H.)

Dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Perasuransian menduduki peringkat ke-3 (tiga), sementara itu Qanun LKS yang setingkat dengan Perda Provinsi menduduki peringkat ke-6 (enam) dalam hierarki perundang-undangan. Hal tersebut seharusnya menjadikan Undang-Undang Perasuransian menjadi aturan yang lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan yang berada dibawahnya. Berkaitan dengan substansi pengaturan pengawasan asuransi syariah, dalam Qanun LKS disebutkan lembaga pengawas penerap prinsip syariah, sedangkan pada Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan untuk mengetahui prinsip pengawasan asuransi syariah pada Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan perbandingan (*Comparative Approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan Undang-Undang, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga perwakilan DSN-MUI yang bertugas mengawasi penerapan fatwa di Provinsi Aceh. Sedangkan DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi kegiatan operasional pada Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia. Pada Qanun LKS, lembaga pengawas penerapan prinsip syariah disebutkan secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan. Dalam implementasinya, pengaruh tidak disebutkannya pengawas pada penerapan prinsip syariah di Undang-Undang Perasuransian tidaklah ada karena sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Diharapkan kepada lembaga pembuat hukum untuk merubah pengaturan asuransi syariah secara khusus sehingga terpisah dari asuransi konvensional. Hal ini guna perkembangan asuransi syariah bisa lebih maju dan dapat memaksimalkan perekonomian di Indonesia dengan berpedoman kepada prinsip syariah.

Kata Kunci: Pengawasan, Asuransi Syariah, Qanun

SUMMARY

DINDA SABRINA NAINGGOLAN
190510038

Comparative Analysis of Sharia Insurance Supervision in Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M. Hum. and Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H.)

In the legislative hierarchy in Indonesia, the Insurance Law is ranked 3rd (three), while the Qanun LKS, which is at the same level as the Provincial Regulation, is ranked 6th (sixth) in the legislative hierarchy. This should make the Insurance Law a more complete regulation compared to the regulations under it. Regarding the substance of the regulation of sharia insurance supervision, in the Qanun LKS it is stated that the supervisory institution applies sharia principles, while the Insurance Law does not mention it.

The purpose of this study is to analyze the supervision of the Aceh Sharia Council (DSA) in the Qanun LKS with the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the Insurance Law, and to find out the principles of sharia insurance supervision in the Qanun LKS and the Insurance Law.

The research method used to answer this research problem is qualitative with a type of normative juridical legal research that uses the Statute Approach and Comparative Approach. The nature of this research is descriptive by collecting laws, books, articles, and so on from various sources related to the title being studied.

The result of this study is that DSA is a representative institution of DSN-MUI that is tasked with supervising the implementation of fatwas in Aceh Province. Meanwhile, DPS is an independent institution tasked with supervising operational activities at Sharia Financial Institutions throughout Indonesia, in accordance with sharia principles. In the Qanun LKS, the supervisory institution for the application of sharia principles is clearly mentioned, while in the Insurance Law it is not mentioned. In its implementation, the influence of the supervisor on the application of sharia principles in the Insurance Law does not exist because it has been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 43/POJK.05/2019 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.

It is expected that law-making institutions will change the regulation of sharia insurance specifically so that it is separate from conventional insurance. This is so that the development of sharia insurance can be more advanced and can maximize the economy in Indonesia by being guided by sharia principles.

Keywords: Supervision, Sharia Insurance, Qanun

